

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanah Hitam Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan responden dari hasil penelitian dalam penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang telah berjalan dengan baik dimana dari 54 responden, semuanya mendapatkan sertifikat atas bidang tanah yang didaftarkan melalui program PTSL di Desa Tanah Hitam, dimana program PTSL ini merupakan program yang diberikan oleh Pemerintah dalam membantu masyarakat dalam mengurus kepastian hukum mengenai hak atas bidang tanah, dan dalam pelaksanaan PTSL ini telah mendapat hasil yang positif dan juga mendapat respon positif dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, saran yang diberikan penulis kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang terkhusus untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang yaitu menambah tenaga kerja dalam merekrut tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang yang dikarenakan kekurangan dari SDM tersebut, dan juga diharapkan untuk dalam kegiatan PTSL lebih transparan dan lebih memberikan banyak penyuluhan ataupun iklan mengenai program PTSL sehingga

dalam pelaksanaan PTSL kedepannya tidak hanya 1 desa saja yang ikut dari suatu kecamatan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Rubaie, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang: Bayumedia, 2007.
- A. Tehupeiry, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Depok: Raih Asa Sukses, 2012.
- W. Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Bantul: Thafa Media, 2014.
- A. Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- A. Sutedi, Peralihan Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta: SinarGrafika, 2010.
- A. Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- B. Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008.
- J. E. d. J. Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- J. J. Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010.
- S. M. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, Buku Pedoman Penulisan Hukum, Yogyakarta: UAJY, 2019.
- S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- U. Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- W. d. H. Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

2. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-undang Republik Indonesia.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Internet :

<https://kalbar.antaranews.com/berita/492697/realisasi-program-pts-l-di-ketapang-80-persen-dari-target>

<https://portalkalbar.id/tiga-kecamatan-di-ketapang-dapat-program-pts-l-pbt/>

<https://www.kalbaronline.com/2021/11/03/bpn-ketapang-optimis-program-pts-l-di-ketapang-selesai-100-persen/>

<https://kab-ketapang.atrbpn.go.id/pengumuman/detail/477/persyaratan-pts-l-2022>

<https://ketapangkab.bps.go.id/dynamictable/2016/10/28/24/luas-wilayah-kabupaten-ketapang-menurut-kecamatan-dan-persentase-terhadap-luas-wilayah-kabupaten-ketapang-tahun-2015.html>

<https://peta.web.id/peta/kec/singkup-166>